



Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia is licensed under
A Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

KRITIK IDEOLOGIS NARASI SEJARAH ORDE BARU: ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH PADA BUKU TEKS IPS KELAS IX

Riza Ummami¹⁾, Nailul Fauziyah²⁾

¹⁾ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia
E-mail: 19130043@student.uin-malang.ac.id

²⁾ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia
E-mail: nailulfauziyah@uin-malang.ac.id

Abstract. This research focuses on how the author narrates the political, economic, and social life development of the community in the New Order historical material in the Social Science Class IX textbook, as well as how the results of writing the New Order historical theme are reviewed from the perspective of critical discourse analysis of the Norman Fairclough model. This study uses a qualitative descriptive method with data sources in the form of Class IX Social Sciences textbooks. The data collection technique was carried out through documentation and interviews, with the researcher as the main instrument. The data analysis uses the Norman Fairclough model critical discourse analysis approach, which includes text analysis, discourse practice, and sociocultural practice. The results of the study show that the writing of content about political, economic, and social life developments during the New Order period in the textbook contains bias against certain interests. An unbalanced selection of facts indicates the existence of framing that favors certain parties. Although the author has no specific political affiliation, the references used are controversial regarding the truth of historical facts. In addition, framing in textbooks is done consciously, influenced by the author's background growing up in the government environment.

Keywords: Textbooks, New Order, Critical Discourse Analysis

Pendahuluan

Buku teks menjadi sumber pembelajaran utama yang sangat esensial dalam setiap jenjang Pendidikan (Torkar et al., 2022). Keberadaanya menjadi pedoman utama yang digunakan pada satuan pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Buku teks dirancang dengan muatan materi yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, sesuai kurikulum yang berlaku sehingga proses pembelajaran berjalan secara sistematis dan terarah (Susanto et al., 2022a). Buku teks pelajaran (IPS) Ilmu Pengetahuan Sosial untuk jenjang SMP dirancang secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial, seperti Ekonomi, Geografi, Sosiologi, dan juga Sejarah. Setiap bab yang tersusun dalam buku ini memiliki karakteristik khas yang bertujuan mempermudah peserta didik dalam memahami materi sesuai dengan bidang ilmu yang disajikan. Pembelajaran sejarah,

buku teks masih menjadi media utama yang digunakan oleh guru dan siswa. Selain berfungsi sebagai media, buku teks dianggap sebagai sumber referensi utama yang tetap digunakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar (Syahrman & Mulyana, 2021).

Buku teks sejarah merupakan salah satu sumber belajar penting dalam pembelajaran di sekolah, karena menyajikan informasi tentang peristiwa, tokoh dan perkembangan peradaban manusia (Hasudungan, 2021). Oleh sebab itu, pemilihan buku teks yang tepat sangat diperlukan agar siswa mendapatkan materi yang berkualitas dan efektif. Selain itu, buku yang digunakan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku di suatu negara atau wilayah (Haikal et al., 2003). Penulisan buku teks sejarah merupakan bagian dari historiografi yang bertujuan untuk membangun Kembali narasi sejarah dengan menitikberatkan pada kepentingan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai ideologis. Namun, kepentingan ideologis ini tidak selalu mengarah pada hal-hal negatif. Justru sebaliknya, terdapat banyak sisi positif yang dapat dimanfaatkan, seperti, penekanan pembentukan pada nilai-nilai serta pemaknaan dari suatu peristiwa sejarah untuk kepentingan bersama (Mulyana, 2009).

Pembelajaran sejarah memiliki peran penting dalam membangun pendidikan politik dan memperkuat identitas kebangsaan. Melalui pemahaman sejarah nasional Indonesia, peserta didik dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, mempererat solidaritas sosial, serta menghargai perjuangan para pendahulu (Sukardi & Sepriady, 2020). Sebagai bagian dari kurikulum Pendidikan dan mata pelajaran di sekolah, Sejarah tidak hanya menyajikan peristiwa di masa lalu tetapi juga memiliki tanggung jawab penting untuk mengajarkan nilai-nilai keteladanan yang dapat menjadi insprasi bagi generasi mendatang (Ainishifa et al., 2023). Materi sejarah dalam buku teks Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas IX terbitan Kemendikbud menyajikan perjalanan kepemimpinan di Indonesia secara kronologis, mulai dari Masa Kemerdekaan, Masa Demokrasi Parlementer, Masa Demokrasi Terpimpin, Masa Orde Baru hingga Masa Reformasi. Pembelajaran sejarah, guru diharapkan dapat membimbing peserta didik tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa penting, tetapi juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme, pembentukan karakter, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis berbagai peristiwa sejarah pada peserta didik (Hatmono, 2021).

Pembelajaran yang mendorong nalar kritis harus berlangsung secara dua arah. Jika hanya satu arah, fokusnya akan tertuju pada guru, sehingga peserta didik memiliki keterbatasan dalam memberikan umpan balik (Tan et al., 2019). Kemampuan berpikir kritis dapat dikembangkan melalui pemahaman materi secara mendalam dari berbagai perspektif. Keterampilan ini dikenal sebagai *historical thinking*, yaitu kemampuan memahami perubahan waktu, membandingkan, menganalisis, serta menginterpretasikan catatan sejarah (Nurjanah, 2020) dalam Sejarah. Penyusunan materi sejarah dalam buku teks Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dirancang untuk mendukung pembelajaran sejarah yang lebih bermakna. Sebagai bagian dari system Pendidikan, sejarah tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan pemahaman identitas bangsa. Oleh karena itu, penyusunannya berlandaskan pada filosofi Pendidikan yang dianut oleh suatu negara. Filosofi ini sering mencerminkan kebijakan rezim yang berkuasa saat itu (Suryo & Ipong, 2015). Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) lahir sebagai bagian dari kebijakan

pemerintah Orde Baru dalam program pendidikan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pertama kali diperkenalkan dan diintegrasikan dalam kurikulum 1975, IPS terus mengalami perkembangan dan pembaruan agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan sosial peserta didik di setiap generasi. Meskipun demikian, disiplin ilmu dalam IPS berakar pada konsep social studies, di mana materi pembelajarannya berfokus pada permasalahan sosial yang dikaji secara terpadu melalui berbagai ilmu sosial (Kwenin, 2021). Kurikulum IPS idealnya dirancang untuk membantu peserta didik memahami dan menyelesaikan masalah sosial dari perspektif ilmu sosial yang menyeluruh. Pendekatan ini bertujuan untuk mendekatkan mereka dengan realitas yang ada di masyarakat (Birsyada, 2014).

Materi dalam buku teks siswa dalam pembelajaran sejarah umum masih didominasi oleh narasi sejarah politik yang berfokus pada kekuasaan serta dinamika naik turunnya suatu pemerintahan dalam periode tertentu, hal ini tampak jelas pada masa Orde Baru, buku teks pelajaran sejarah digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah, yang menyebabkan terjadinya kesalahan pemahaman peristiwa sejarah di kalangan siswa (Afriyati, 2023). Materi sejarah pada periode tersebut sangat menekankan peran militer (ABRI) secara dominan. Ketika era Reformasi dimulai, muncul upaya untuk memperbarui penulisan sejarah dalam buku pelajaran. Analisis terhadap historiografi buku teks sejarah pada kedua periode ini penting dilakukan, karena dapat menunjukkan bagaimana politik suatu rezim memengaruhi isi pendidikan, khususnya muatan politik dalam narasi sejarah. (Budiono & Awaludin, 2017). Karena buku teks sejarah memiliki peran penting dalam pembelajaran, sering kali buku tersebut dijadikan sebagai satu-satunya sumber bagi siswa dalam memperoleh pengetahuan. Padahal, dalam realitasnya, buku teks dapat menjadi alat bagi rezim yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya di mana propaganda mereka meresap ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan (Arta, 2012).

Kelompok Orde Baru, khususnya kalangan modernis, melakukan rekonstruksi terhadap identitas nasional dalam buku pelajaran sejarah yang diajarkan kepada siswa SMA (Purwanta, 2012). Membuat buku teks sejarah pada masa itu disusun dengan narasi yang menempatkan rezim Soeharto sebagai penyelamat, sehingga membatasi pemahaman masyarakat terhadap sejarah. Wacana ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan, menciptakan legitimasi kekuasaan yang semakin mengakar dan dianggap sebagai kebenaran mutlak. Jangka panjang, hal ini memengaruhi cara berpikir masyarakat. Oleh karena itu, menurut Susanto (2022), penguatan budaya berpikir kritis dalam pendidikan, terutama di tingkat sekolah menengah, menjadi sangat penting. Analisis wacana kritis dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap makna tersembunyi di balik narasi sejarah dalam buku teks (Susanto et al., 2022).

Konsep awal Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) diperkenalkan dalam kurikulum dan terus berkembang seiring waktu dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan sosial dari masyarakat (Byford & Russell, 2007), (Ross, 2014). IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam Kurikulum 1975 (Sapriya, 2009), dan mulai diperkenalkan dalam Kurikulum 1975 sebagai mata pelajaran yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial (Rahmad, 2016). Tujuan utama dari pendidikan IPS membekali peserta didik dengan pemahaman yang holistik

dari berbagai disiplin ilmu sosial, sehingga mereka dapat menganalisis dan mencari solusi atas permasalahan sosial di lingkungan sekitar mereka. Dengan pendekatan ini diharapkan peserta didik mampu memahami realitas sosial secara lebih dekat dan relevan (D. Setiawan, 2013). Mengingat Pelajaran di sekolah tidak bisa dilepaskan dari wacana dan teks, untuk itu analisis wacana kritis bertujuan untuk mengungkap makna tersembunyi dibalik teks, serta memahami bagaimana teks tersebut membentuk dan mempengaruhi pemikiran dan tindakan individu maupun kelompok (Haryatmoko, 2016).

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu kiranya dilakukan analisis wacana kritis dalam buku teks Pelajaran. Melalui analisis wacana kritis model Norman Fairclough, kita dapat menelaah terkait bagaimana penulis buku menarasikan perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat pada materi sejarah Orde Baru dalam buku teks IPS Kelas IX terbitan Kemendikbud. Analisis wacana kritis Norman Fairclough mengkaji bagaimana wacana sebagai bagian dari interaksi sosial yang mencerminkan hubungan kekuasaan dan ideologi (Moghaddam, 2024). Melalui pendekatan ini, dapat diungkap bahwa bahasa, baik lisan maupun tulisan, tidak netral melainkan mencerminkan praktik sosial tertentu. Setiap praktik bahasa selalu terhubung dengan realitas sosial dan struktur yang melingkupinya. Konteks ini, institusi negara memainkan peran penting dalam membentuk dan menyebarluaskan ideologi melalui media seperti buku teks sejarah (Rismawan et al., 2023).

Metode

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif, data deskriptif yang dimaksud berupa kata, klausa, frasa, kalimat, atau paragraph (Moleong, 2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Penelitian ini data yang digunakan berupa buku Ilmu Pengetahuan Sosial IPS Kelas IX Terbitan Kemendikbud 2018 (I. Setiawan et al., 2018). Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan mengamati dan mencermati wacana yang dibangun dalam buku teks tersebut, khususnya pada materi Sejarah Orde Baru yang telah dianalisis oleh peneliti. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana praktik sosial memengaruhi proses penyusunan dan pemaknaan teks sejarah Orde Baru dalam buku teks Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Penelitian ini, peneliti juga menggunakan pisau analisis untuk mempertajam hasil kajian dengan pendekatan *Critical Discourse Analysis* (Analisis Wacana Kritis) model Norman Fairclough. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna dalam teks. Analisis wacana kritis merupakan metode yang digunakan dalam studi wacana untuk mengungkap manipulasi makna dalam bentuk teks atau bahasa yang termuat dalam berbagai tulisan, dengan melihat bagaimana dominasi praktik sosial terjadi. Visualisasi terhadap wacana di tingkat praktik sosial akan membentuk relasi dialektik antara peristiwa wacana dengan institusi, situasi, atau struktur sosial yang membentuknya (Fairclough, 2013). Wacana kritis model Norman Fairclough membagi objek penelitian ke dalam tiga aspek utama: teks, praktik wacana (*Discourse Practice*), dan praktik sosiokultural (*Sociocultural Practice*). Model ini dipilih karena tahapannya dianggap relevan untuk menguraikan dimensi tekstual, menjelaskan praktik wacana, serta menganalisis aspek sosial budaya dalam materi Sejarah Orde Baru.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Pada tahap deskripsi, isi teks dianalisis secara deskriptif dengan menguraikan struktur dan elemen linguistik yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, pada tahap interpretasi, teks dianalisis dalam hubungannya dengan *discourse practice*, yaitu bagaimana teks diproduksi dan dimaknai dalam konteks penggunaannya.

Tahap eksplanasi bertujuan untuk melihat bagaimana teks berhubungan dengan kondisi sosial dan budaya di masyarakat. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan bagaimana teks dibuat, disebarkan, dan dibaca dengan situasi sosial yang memengaruhinya. Analisis bahasanya, peneliti juga memperhatikan pemilihan kata, makna kata, susunan kalimat, serta keterkaitan antar kalimat agar maknanya lebih mudah dipahami. Analisis terhadap teks difokuskan untuk menemukan bagaimana sesuatu digambarkan atau direpresentasikan dalam isi tulisan. Representasi ini dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu dalam satu klausa (anak kalimat), gabungan beberapa klausa, dan dalam rangkaian kalimat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat bagaimana sosok Presiden Soeharto dibentuk atau digambarkan dalam cerita sejarah yang disajikan di buku teks Pelajaran IPS terbitan Kemendikbud.

Praktik wacana mencakup bagaimana teks dibuat dan digunakan. Dalam konteks buku pelajaran, setiap buku memiliki cara penulisan yang berbeda, tergantung siapa yang menuliskannya. Biasanya, buku disusun dengan rapi dan terencana, tetapi gaya dan cara kerja setiap penulis bisa berbeda-beda, sehingga memengaruhi bagaimana isi buku dipahami oleh pembaca. Selain itu, cara pembaca memahami teks juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial mereka. Sementara itu, praktik sosial budaya mencakup konteks eksternal yang mempengaruhi produksi teks, seperti kondisi sosial, situasi politik, dan institusi yang melatarbelakangi teks. Hal ini, hubungan penulis buku dengan lingkungan sosial-politik, termasuk latar belakang dan afiliasi politik penulis, turut membentuk isi dan arah wacana dalam buku teks yang dihasilkan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis wacana kritis model Norman Fairclough, penelitian ini terdiri dari tiga tahap: *analisis teks*, *Discourse Practice*, dan *Sociocultural Practice*. Analisis teks, Fairclough menekankan pada berbagai bentuk komunikasi, seperti lisan, tulisan, grafik, serta kombinasinya, yang mencakup semua aspek linguistik dalam teks. Fokus analisisnya adalah penggunaan kosa kata yang memiliki makna tertentu (Haryatmoko, 2016).

1. Analisis Teks

a. Representasi dalam Anak Kalimat

Pada unsur ini berkaitan dengan bagaimana individu, kelompok, peristiwa, dan bahasa digambarkan dalam teks. Representasi dalam sebuah anak kalimat dapat dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu berdasarkan kosa kata yang digunakan dan struktur tata bahasanya. Penjelasan beserta Analisis teks dapat dilihat pada penjelasan tabel berikut ini:

Table 1. Data Analisa Teks Representasi Dalam Anak Kalimat

Tingkat	Kutipan	Hal	Analisis
Kosakata	<i>“...Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966...”</i>	Hal 262	Penggunaan kata kerja " dikeluarkannya " menjadi penanda dimulainya era kekuasaan Orde Baru.
	<i>“...Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun...”</i>	Hal 262	Kutipan dalam buku teks ini menggambarkan tantangan yang dihadapi Presiden Soekarno dalam merespons tuntutan para demonstran. Penggunaan kata " menurun " mencerminkan kesulitan yang dialaminya dalam meredam konflik yang semakin memanas. Ketidakmampuannya dalam menyelesaikan situasi tersebut kemudian memperburuk keadaan dan memicu ketidakpuasan yang semakin besar di kalangan demonstran.
Tata Bahasa	<i>“...Kondisi ini mendorong para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G 30 S/PKI dan perbaikan ekonomi...”</i>	Hal 262	Wacana ini menggambarkan bahwa aksi demonstrasi muncul sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap upaya penyelesaian konflik pasca peristiwa Gerakan 30 September.
	<i>“Pada tanggal 12 Januari 1966 pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)...”</i>	Hal 263	Kutipan tersebut menggambarkan bagaimana pemilihan wacana dalam buku teks digunakan untuk menyoroti peran para demonstran dalam peristiwa yang dibahas
	<i>“...Untuk menenangkan rakyat Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri..”</i>	Hal 263	Kutipan tersebut mengindikasikan bahwa Presiden Soekarno menjadi faktor utama yang mendorong demonstran beralih menuju Istana Merdeka.

b. Representasi dalam Kombinasi Anak Kalimat.

Unsur ini menyoroti bahwa penggabungan antara satu anak kalimat dengan anak kalimat lainnya dapat menghasilkan kalimat yang memiliki makna secara kohesif dan koheren. Koherensi bertujuan untuk membangun ideologi tertentu, yang dapat diwujudkan dalam bentuk elaborasi, perluasan, dan penguatan. Penjelasan beserta Analisis teks dapat dilihat pada penjelasan tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Data Analisis Teks Representasi Dalam Kombinasi Anak Kalimat

Bentuk	Kutipan	Hal	Analisis
Elaborasi	“...Letjen Soeharto memperbaharui kabinet dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPR-Gotong Royong dari orang-orang yang dianggap terlibat G30S/PKI...”	Hal 264	Kutipan tersebut mengungkapkan keberadaan konjungsi " yang " yang secara semantik menunjukkan bahwa sebagian individu dalam pemerintahan turut berperan dalam peristiwa Gerakan 30 September. Elaborasi berperan dalam menjelaskan anak kalimat pertama, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi seperti "yang," "lalu," atau "selanjutnya."
Perpanjangan	“...Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program...”	Hal 256	Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan konjungsi " tetapi " berfungsi untuk menghubungkan gagasan dalam kalimat. Makna yang terkandung di dalamnya menegaskan bahwa kebijakan Presiden Soeharto dalam menggabungkan partai politik bukan untuk menyeragamkan ideologi, melainkan untuk menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan program-program pemerintahan
	“...Direncanakan, Pelita VI dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1994 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. Namun , pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah...”	Hal 269	Dalam buku teks, perpanjangan dalam anak kalimat digambarkan dengan penggunaan konjungsi " namun " yang secara semantik menunjukkan bahwa program Pelita VI, yang seharusnya selesai pada tahun 1999, harus berakhir lebih cepat akibat krisis ekonomi pada tahun 1997. Perpanjangan adalah bentuk deskripsi dari anak kalimat pertama, di mana anak kalimat tersebut berfungsi sebagai kelanjutan sekaligus penjelas dari anak kalimat sebelumnya. Konjungsi yang umum digunakan dalam perpanjangan mencakup “dan” atau dapat bersifat kontras terhadap anak kalimat lain, seperti “tetapi,” “meskipun,” “walaupun,” “akan tetapi,” dan sebagainya.
Mempertinggi	“...Melalui penataran P4 itu, pemerintah menekankan bahwa masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan masalah yang sensitif di Indonesia...”	Hal 266	Kutipan tersebut memperkuat gagasan sebelumnya dengan penjelasan yang koheren melalui penggunaan konjungsi pertentangan " bahwa " Secara makna, kutipan ini mencerminkan keyakinan Presiden Soeharto bahwa penataran P4 dapat berperan sebagai langkah preventif

dalam mencegah terjadinya konflik sosial.

c. *Representasi dalam Rangkaian Antarkalimat*

Aspek ini, perlu diperhatikan penggabungan dua atau lebih kalimat sehingga terbentuk anak kalimat yang memiliki penekanan lebih dibandingkan anak kalimat lainnya. Penjelasan beserta Analisis teks dapat dilihat pada penjelasan tabel berikut ini:

Tabel 1.3. Data Analisis Teks Representasi Dalam Rangkaian Antar Kalimat

Hal Yang Diamati	Kutipan	Hal	Analisis
Dua kalimat atau lebih yang dirangkai sehingga menghasilkan hubungan antar anak kalimat yang lebih menonjol dari anak kalimat lainnya	<i>“...Dwi Fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai kekuatan sosial secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembanguna nasional. Dengan peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya...”</i>	Hal 267	Rangkaian kalimat tersebut membentuk struktur yang menyoroti satu anak kalimat lebih dominan, sehingga dapat memengaruhi persepsi pembaca. Dalam konteks ini, anak kalimat tersebut menggambarkan kebijakan politik Presiden Soeharto yang dinilai membatasi keterlibatan warga sipil di luar ABRI dalam pemerintahan

d. *Relasi Teks*

Aspek ini, penggabungan dua atau lebih kalimat diperhatikan sehingga menghasilkan anak kalimat yang lebih dominan dibandingkan anak kalimat lainnya. Penjelasan beserta Analisis teks dapat dilihat pada penjelasan tabel berikut ini:

Tabel 1.4. Data Analisis Relasi Teks

Hal Yang Diamati	Temuan	Analisis
Tokoh-tokoh atau kelompok yang disebut dalam teks dan memiliki keterkaitan dengan periode Orde Baru	“Presiden Soekarno, Demonstran, Presiden Soeharto, PKI, Cakrabirawa, Golkar, PNS dan ABRI”	Aspek relasi teks dalam buku sejarah Orde Baru menampilkan berbagai partisipan atau tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa tersebut, termasuk Soekarno, demonstran, Soeharto, PKI, Cakrabirawa, Golkar, PNS, dan ABRI. Soekarno , sebagai Presiden pertama Indonesia, berperan dalam awal mula Orde Baru. Demonstran terdiri dari masyarakat, mahasiswa, dan pelajar dideskripsikan sebagai kelompok yang menuntut penyelesaian konflik politik saat itu. Soeharto , yang menjadi Presiden kedua selama 32 tahun, digambarkan sebagai tokoh sentral dalam rezim Orde Baru. PKI

ditampilkan sebagai dalang utama Gerakan 30 September. **Cakrabirawa** pasukan pengaman Presiden Soekarno, bertanggung jawab atas keamanan presiden dan Istana Merdeka. **Golkar** yang berkembang sejak Orde Lama, diperlihatkan sebagai partai politik dominan di era Orde Baru, didukung oleh PNS dan ABRI dalam memenangkan Pemilu. **PNS** berperan sebagai aparatur negara yang turut mengerahkan suara bagi Golkar. **ABRI**, gabungan Polri dan TNI, diposisikan sebagai institusi dengan pengaruh besar dalam pemerintahan Orde Baru serta penyokong kemenangan Golkar dalam Pemilu

e. Data Analisis Identitas Teks

Unsur identitas teks dalam buku ini menunjukkan bahwa pembaca diposisikan sebagai pengamat terhadap peristiwa sejarah yang disajikan. Pembaca, khususnya peserta didik kelas XI di SMP dan MTs, tidak ditempatkan sebagai bagian dari pemerintahan Soekarno, Soeharto, atau kelompok demonstran. Sesuai dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), mereka diharapkan untuk menganalisis kronologi, perubahan, serta kesinambungan dalam berbagai aspek, seperti geografi, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya pada masa Orde Baru. Hal ini bertujuan agar peserta didik memahami dinamika sejarah secara objektif tanpa keterlibatan langsung dalam narasi yang dibangun dalam buku teks. Penjelasan beserta Analisis teks dapat dilihat pada penjelasan tabel berikut ini:

Tabel 1.5. Data Analisis Identitas Teks

Hal Yang Diamati	Temuan
Relasi dari pihak-pihak di dalam teks yang menentukan situasi pembaca	Pembaca buku teks diposisikan sebagai pengamat

2. Discourse Practice

Aspek discourse practice dalam analisis ini menyoroti proses produksi dan konsumsi buku teks, dengan menekankan peran penulis dan keterlibatan pihak terkait. Posisi penulis menjadi faktor utama dalam menentukan konteks penulisan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis yaitu Bapak A. Mushlih, sebagai salah satu penulis buku Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX (2018), memiliki latar belakang pendidikan di bidang Studi Islam serta Teknologi Pendidikan, namun belum pernah menulis buku teks bertema sejarah sebelumnya. Sebelum terlibat dalam penulisan buku ini, ia lebih banyak menulis Lembar Kerja Siswa (LKS).

Proses produksi buku ini berlangsung selama enam bulan, dengan masing-masing penulis bertanggung jawab atas bidang yang telah ditentukan. Meskipun ada kolaborasi dalam bentuk saran dan masukan antarpengarang, muatan materi sejarah dalam buku teks ini tetap berpedoman pada indikator yang telah

ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam Kompetensi Dasar (KD) 3.4 dan 4.4. Sebagai pengarah dan pengawas, Kemendikbud menentukan tema yang harus ditulis serta memastikan bahwa isi buku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penulis tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi materi di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Penjelasan mengenai analisis teks dapat dilihat pada penjelasan tabel berikut ini:

Tabel 2. Data Analisis *Discourse Practice*

Hal Yang Diamati	Temuan
<i>Keterkaitan antara isi buku dengan perspektif penulis serta konteks sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi proses penulisannya</i>	Mushlih menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Syariah, International University of Africa, Khartoum, Sudan, dengan fokus pada Studi Islam. Selanjutnya, ia meraih gelar magister di Universitas Negeri Sebelas Maret dengan spesialisasi Teknologi Pendidikan. Dalam penyusunan buku teks, ia terlibat sebagai salah satu kontributor yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan proses pengerjaan yang berlangsung selama enam bulan. Selain latar belakang akademiknya, pengalaman Mushlih dalam menulis buku menjadi salah satu alasan utama pemilihannya sebagai penulis. Berdasarkan wawancara, ia menyatakan bahwa saat menyusun buku teks tersebut, dirinya memang telah aktif berprofesi sebagai penulis.
<i>Penulis buku memiliki latar belakang budaya politik yang cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi</i>	Berdasarkan keterangan dari narasumber, isi wacana dalam buku tersebut tidak mencerminkan kepentingan pribadi. Selain itu, narasumber juga tidak memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan partai politik mana pun
<i>Penulis Buku Menyikapi Orde Baru</i>	Narasumber memandang Orde Baru sebagai salah satu fase dalam perjalanan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki sisi positif maupun negatif

3. Sociocultural Practice

Aspek sociocultural practice, analisis berfokus pada pemahaman intertekstual, di mana suatu teks dipengaruhi oleh dan sekaligus membentuk praktik sosial. Aspek ini terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu situasional, institusional, dan sosial.

1. Situasional

Aspek ini menekankan bahwa proses produksi teks tidak memiliki situasi yang khas atau unik. Meskipun setiap teks dipengaruhi oleh konteks sosial tertentu, dalam penyusunan buku teks ini, narasumber mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Prosesnya, terdapat tim penelaah dan pengarah dari Kemendikbud yang bertugas memverifikasi kebenaran fakta dalam tema Orde Baru. Saran serta masukan yang diterima oleh penulis berasal dari tim tersebut, sehingga narasumber memposisikan dirinya sebagai kontributor penulis yang bekerja sesuai dengan arahan. Ketika ditanya mengenai tantangan atau kesulitan dalam menulis tema Orde Baru, narasumber menyatakan bahwa ia tidak mengalami kendala berarti. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi buku teks ini berjalan dalam koridor yang telah ditetapkan tanpa adanya hambatan atau dinamika situasional yang signifikan.

2. Institusional

Pada aspek Institusional ini praktik wacana dalam institusi berpengaruh secara tidak langsung terhadap teks yang diproduksi, baik dalam aspek internal maupun eksternal. Kebijakan dan pertimbangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berperan dalam menentukan bagaimana suatu wacana ditampilkan dalam buku teks. Penyusunan materi sejarah Orde Baru dalam Buku Teks IPS Kelas IX, narasumber menyatakan bahwa isi buku harus memenuhi standar kedalaman dan keluasan materi yang telah ditetapkan dalam Kompetensi Dasar (KD). Fakta sejarah yang disajikan harus didukung oleh referensi yang jelas dan telah diverifikasi oleh tim penelaah Kemendikbud. Referensi utama yang digunakan dalam menulis peristiwa Supersemar dan perkembangan politik, ekonomi, serta sosial di masa Orde Baru mencakup:

1. Buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI karya Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (1992)
2. 30 Tahun Indonesia Merdeka karya Ginanjar Kartasasmita (1981)
3. Buku Teks IPS (BSE) dari Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional

Narasumber menggunakan arsip dokumen negara dalam menulis kebijakan ekonomi Orde Baru, ia menjelaskan bahwa referensi yang digunakan dalam buku teks adalah sumber-sumber yang telah melalui proses review dan telaah oleh para ahli. Hal ini menegaskan bahwa proses penulisan buku teks mengikuti ketentuan akademik dan kebijakan institusional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Sosial

Aspek sosial dalam buku teks ini menyoroti sistem politik, ekonomi, dan budaya masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks politik, buku teks menggambarkan ketidakstabilan politik Indonesia sebelum Orde Baru, terutama setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kondisi tersebut memicu tuntutan masyarakat agar Presiden Soekarno mengambil tindakan tegas, yang akhirnya berujung pada Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dan membawa Soeharto ke tampuk kekuasaan. Setelah berkuasa, Presiden Soeharto melakukan berbagai reformasi politik, seperti pemulihan politik luar negeri, penyederhanaan partai politik, pemilihan umum, serta penerapan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Dwifungsi ABRI.

Sektor ekonomi, kebijakan yang diterapkan pada masa Orde Baru bertujuan untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional, termasuk menekan laju inflasi, menstabilkan keuangan negara, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu program unggulannya adalah Pembangunan Lima Tahun (Pelita), yang berlangsung dari tahun 1969 hingga 1997. Sementara itu, dalam aspek sosial, buku teks menyoroti keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam menjaga stabilitas politik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program seperti transmigrasi, keluarga berencana (KB), peningkatan layanan kesehatan, pembangunan sekolah, dan pengembangan seni budaya menjadi bagian dari kebijakan sosial pada masa itu.

Mengenai penekanan buku teks pada pencapaian positif Presiden Soeharto, narasumber menjelaskan bahwa penyajian materi tidak dimaksudkan untuk menonjolkan keberhasilan semata, tetapi untuk

menunjukkan perubahan kondisi politik, ekonomi, dan sosial dibandingkan dengan masa sebelumnya. Sebagai penulis, narasumber tidak memiliki wewenang untuk mengubah atau menambahkan narasi di luar ketentuan. Konten buku teks telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, sehingga penulis hanya bertindak sebagai kontributor tanpa kebebasan penuh dalam menarasikan isi buku.

Tabel 3. Data Analisis Sociocultural Practice

Level	Temuan
Situasional	Teks disusun dalam konteks yang terikat pada kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah
Institusional	Pusat Kurikulum dan Perbukuan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Sosial	Aspek sosial dalam buku teks tercermin melalui narasi penulis yang menyoroti dinamika kekuasaan dalam masyarakat

Diskusi

Analisis Tekstual Narasi Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Kehidupan Masyarakat Dalam Buku Teks IPS Kelas IX

Pada bagian analisis tekstual, dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama. *Aspek pertama* adalah representasi anak kalimat, yang mencakup kosakata dan tata bahasa. Kosakata yang digunakan untuk menggambarkan situasi pada masa Orde Baru dapat ditemukan dalam kalimat "Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966" (hlm. 262) (I. Setiawan et al., 2018). Sementara itu, tata bahasa yang digunakan juga menampilkan tindakan dan peristiwa pada saat itu, seperti dalam kalimat "Untuk menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri" (hlm. 263) (I. Setiawan et al., 2018). *Aspek kedua* adalah representasi dalam kombinasi anak kalimat, yang terbagi menjadi elaborasi, perpanjangan, dan mempertinggi. Elaborasi terjadi ketika satu anak kalimat berfungsi sebagai penjelas bagi anak kalimat lainnya, seperti pada kalimat "Letjen Soeharto memperbarui kabinet dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPR-Gotong Royong dari orang-orang yang dianggap terlibat G30S/PKI" (hlm. 264) (I. Setiawan et al., 2018). Perpanjangan menggambarkan bahwa anak kalimat kedua memperjelas atau memperluas makna dari anak kalimat pertama, seperti dalam kalimat "Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program" (hlm. 265) (I. Setiawan et al., 2018). Sementara itu, mempertinggi menunjukkan bahwa anak kalimat pertama memiliki kedudukan lebih tinggi karena menjadi penyebab dari peristiwa dalam kalimat berikutnya. Hal ini terlihat dalam kalimat "Melalui penataran P4 itu, pemerintah menekankan bahwa masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan masalah yang sensitif di Indonesia" (hlm. 266) (I. Setiawan et al., 2018). *Aspek ketiga* adalah representasi dalam rangkaian antarkalimat, yang memperhatikan hubungan antara

dua atau lebih kalimat yang digabungkan sehingga menghasilkan anak kalimat dengan tingkat penonjolan yang berbeda. Contohnya terdapat dalam kalimat "Dwi Fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai kekuatan sosial secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dengan peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya" (hlm. 267) (I. Setiawan et al., 2018). *Aspek keempat* berkaitan dengan hubungan dalam teks, yang memperlihatkan berbagai aktor atau pihak yang berperan dalam sejarah Orde Baru sebagaimana disajikan dalam buku teks, seperti Soekarno, demonstran, Soeharto, PKI, Cakrabirawa, Golkar, PNS, dan ABRI. Sementara itu, aspek identitas teks merujuk pada interaksi antara berbagai pihak yang membentuk pemahaman pembaca terhadap narasi. Dalam buku teks ini, pembaca ditempatkan sebagai pengamat pasif tanpa keterlibatan langsung dalam alur cerita yang disampaikan.

Analisis Praktik Wacana Narasi Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Kehidupan Masyarakat Dalam Buku Teks IPS Kelas IX.

Analisis praktik wacana *discourse practice*, penelitian ini menelusuri bagaimana buku teks proses produksi dan konsumsi. Posisi penulis buku teks menjadi kunci dalam memahami konteks situasi yang melatarbelakangi proses produksinya. Berdasarkan informasi biografi dalam buku teks, A. Mushlih adalah seorang penulis yang menyelesaikan studi Sarjana di Fakultas Syariah, International University of Africa, Khartoum, Sudan, dengan fokus pada program studi Studi Islam. Ia kemudian melanjutkan pendidikan Magister di Universitas Negeri Sebelas Maret, dengan fokus pada Teknologi Pendidikan. Bagi narasumber, penulisan tema sejarah dalam Buku Teks Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas IX (2018) merupakan pengalaman pertamanya bagi narasumber dalam menyusun buku bertema sejarah (A. Mushlih, personal communication, 2023). Namun, ia sebelumnya telah memiliki pengalaman dalam menyusun buku lembar kerja siswa (LKS). Dalam menyusun materi sejarah dalam buku teks tersebut, narasumber mengacu dan berpedoman pada indikator yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud, yang tertuang dalam Kompetensi Dasar (KD) 3.4 dan 4.4. Ketentuan ini bersifat baku, sehingga narasumber tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi materi di luar yang telah ditentukan dalam Kompetensi Dasar.

Analisis Praktik Sosiokultural Narasi Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Kehidupan Masyarakat Dalam Buku Teks IPS Kelas IX

Aspek praktik sosiokultural *sociocultural practice*, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman intertekstual, yaitu bagaimana sebuah teks dipengaruhi oleh dan turut membentuk praktik sosial. Aspek ini terbagi menjadi tiga level: situasional, institusional, dan sosial.

- *Aspek Situasional*: pada pada level ini, teks yang dihasilkan mencerminkan kondisi khas dan unik dari konteks tertentu, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dari teks lainnya. Jika wacana dipahami sebagai sebuah tindakan, maka tindakan tersebut merupakan respons terhadap konteks sosial tertentu. Setiap peristiwa yang ditampilkan dalam teks dirancang dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi, termasuk factor emosional dan atmosfer yang menyertainya. Dalam proses produksinya, teks tetap berlandaskan regulasi dan kebijakan pemerintah.
- *Aspek Institusional*, Level ini praktik wacana dalam suatu institusi, baik dari aspek internal maupun eksternal, berperan dalam membentuk teks yang dihasilkan. Keputusan dan kebijakan institusi memiliki pengaruh penting dalam menentukan bagaimana suatu wacana disajikan dalam teks.
- *Aspek Sosial*, Pada tahap ini analisis menyoroti bagaimana sistem politik, ekonomi, dan budaya membentuk masyarakat secara luas. Melalui sistem-sistem tersebut, dapat diidentifikasi aktor-aktor yang memegang kendali kekuasaan, nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat, serta cara kelompok yang berkuasa dapat memengaruhi perilaku dan arus informasi media.

Narasi yang disajikan mengenai perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat dalam materi Sejarah Orde Baru dirancang agar selaras dengan capaian Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Selain itu, materi juga disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik di tingkat Sekolah Menengah Pertama, di mana mereka masih menggunakan konsep berpikir kronologis. Artinya, peserta didik cenderung memahami peristiwa secara berurutan, sistematis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, buku teks ini menyajikan narasi yang merunut perkembangan sejarah dari Orde Lama hingga Reformasi, dengan penjelasan setiap subbab yang disusun secara kronologis, mulai dari kejatuhan suatu rezim hingga proses pergantian kepemimpinan berikutnya.

Berdasarkan analisis teks dalam buku tersebut, ditemukan bahwa penyajian materi mengenai perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial pada masa Orde Baru cenderung bias dan berpihak pada kepentingan tertentu. Indikasi ini terlihat dari porsi materi yang diberikan dalam setiap subtopik, yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam penyajian fakta. Selain itu, pemilihan fakta yang tidak diimbangi dengan perspektif lain dapat mengarah pada dugaan framing yang mengunggulkan pihak tertentu. Dari aspek produksi, peneliti ini mengungkap bahwa proses penyusunan buku teks dibatasi oleh Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang ditetapkan oleh Kemendikbud, Sehingga ruang gerak penulis atau contributor menjadi terbatas. Meskipun tidak ditemukan afiliasi langsung terhadap kelompok tertentu, namun referensi yang digunakan masih memuat kontroversi terkait keakuratan fakta terhadap kebenaran fakta sejarahnya.

Dimensi praktek sosial *sociocultural practice*, dapat disimpulkan bahwa proses framing dalam buku teks dilakukan secara sadar oleh penulis. Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah latar belakang penulis yang bekerja di lingkungan pemerintahan, sehingga ia cenderung menggunakan referensi yang telah ditetapkan, meskipun beberapa di antaranya pernah menjadi kontroversi. Selain itu, melalui buku teks sejarah, pemerintah telah menerapkan praktik sentralisasi kurikulum sejak era

Orde Baru. Kebijakan ini berdampak pada pola pembelajaran di sekolah, yang pada akhirnya mempengaruhi cara masyarakat dalam memahami dan menafsirkan sejarah.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa muatan materi dalam buku teks telah disusun sesuai dengan capaian Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Namun, dalam penarasian mengenai perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat, ditemukan adanya kecenderungan bias terhadap kepentingan tertentu. Meskipun penulis tidak memiliki afiliasi dengan golongan politik tertentu, penggunaan referensi yang kontroversial pada masa Orde Baru menunjukkan adanya pengaruh dari sentralisasi kurikulum yang diterapkan oleh rezim tersebut. Pola sentralisasi ini terus berlanjut dan masih memengaruhi penyusunan buku teks hingga saat ini. Di samping itu, penyajian fakta yang tidak disertai dengan fakta pembanding bisa diartikan sebagai upaya sadar dari penulis untuk membentuk framing yang berpihak pada satu pihak tertentu. Tindakan framing ini tampaknya dilakukan secara sengaja, yang kemungkinan berkaitan dengan latar belakang penulis sebagai bagian dari institusi pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Afriyati, E. N. I. (2023). *Mengulik Kebenaran Buku Teks Sejarah Masa Orde Baru Tahun*. <https://www.researchgate.net>
- Ainishifa, H., Bunari, B., & Suroyo, S. (2023). Pengaruh Media Interaktif Berbasis Wordwall Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Sejarah di Kelas XI SMA Negeri 1 Kabun. *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, 8(3), 321–331.
- Arta, K. S. (2012). Kurikulum dan Kontroversi Buku Teks Sejarah Dalam KTSP. *Jurnal Media Komunikasi FPIPS Undiksha*, Vol. 11(No. 1), 153–168. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v11i2.459>
- Birsyada, M. I. (2014). Sejarah Perkembangan IPS di Indonesia. *Program Magister Pendidikan IPS Universitas PGRI Yogyakarta*, Vol. 1(No. 2), 233–245.
- Budiono, H., & Awaludin, A. F. (2017). Perkembangan historiografi buku teks sejarah di indonesia masa orde baru hingga reformasi. *Efektor*, 4(2), 36–43.
- Byford, J., & Russell, W. (2007). The New Social Studies: A historical examination of curriculum reform. *Social Studies Research and Practice*, 2(1), 38–48.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Routledge. <https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315834368&type=googlepdf>
- Haikal, F., Nababan, S. A., Kaban, B. J., Darma, A., & Alkhair, F. (2003). Analisis Pemilihan Buku Teks Sejarah dalam Pemanfaatan Sebagai Sumber Belajar Untuk Siswa/Siswi di SMA Swasta Rakyat. *KEGURUAN, Jurnal Penelitian, Pemikiran Dan Pengabdian*, Vol. 11(No. 1), 16–21.
- Haryatmoko. (2016). *Critical Discourse Analysis Analisis Wacana Kritis: Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Rajawali Pers.

- Hasudungan, A. N. (2021). Penggunaan buku teks sejarah indonesia pada satuan pendidikan menengah atas dalam kurikulum 2013. *Education & Learning*, 1(1), 12–19.
- Hatmono, P. D. (2021). Historiografi Buku Teks Sejarah Lokal Pada Pembelajaran Sejarah. *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 2(1), 60–74.
- Kwenin, I. (2021). Challenges of implementing the integrated social studied curriculum in Ghana. *International Journal of Education and Social Science*, 8(1), 40–48.
- Moghaddam, K. A. (2024). Critical discourse analysis: A review of the views of Ernesto Laclau, Chantal Mouffe and Norman Fairclough. *International Journal of Advanced Research in Humanities and Law*, 1(2), 86–90.
- Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi Cet. Ketigapuluh. Bandung: Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mulyana, A. (2009). Historiografi di Indonesia: Dari magis-religius hingga strukturalis. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796836703872>
- Mushlih, A. (2023). Wawancara Penulis buku IPS [Personal communication].
- Nurjanah, W. (2020). Historical thinking skills and critical thinking skills. *Historika*, 23(1), 92–104.
- Purwanta, H. (2012). Wacana Identitas Nasional: Analisis Isi Buku Teks Pelajaran Sejarah Sma 1975 –2008. *Paramita: Historical Studies Journal*, 22(1). <https://journal.unnes.ac.id/nju/paramita/article/view/1878>
- Rahmad, R. (2016). Kedudukan ilmu pengetahuan sosial (IPS) pada sekolah dasar. *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 67–78.
- Rismawan, D., Purwanta, H., & Susanto, S. (2023). Discourse on Sukarno's Narrative in History Textbooks: Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis of the 3rd Grade History Textbook Curriculum 1975. *International Journal of Social Science And Human Research*, Vol.06(03). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i3-57>
- Ross, E. W. (2014). *The social studies curriculum: Purposes, problems, and possibilities*. State University of New York Press. <https://books.google.com>
- Sapriya, S. (2009). Pendidikan IPS konsep dan pembelajaran. *Remaja Rosdakarya*.
- Setiawan, D. (2013). Reorientasi Tujuan Utama Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dalam Perspektif Global. *JUPIIS Jurnal Pendidikan Ilmi-Ilmu Sosial UNIMED*, Vol.5(No.2), 58–72.
- Setiawan, I., Pusparatri, R. K. D., Suciati, suciati, & Mushlih, A. (2018). *Buku Guru Ilmu Pengetahuan Sosial*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://static.buku.kemdikbud.go.id/>
- Sukardi, S., & Sepriady, J. (2020). Peran Pendidikan Sejarah Dalam Membentuk Karakter Bangsa. *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, 6(2), 114–117.
- Suryo, N. A., & Ipong, J. (2015, September 26). Muatan Sejarah Peristiwa Kontroversial (Sejarah Kontroversial) Pada Buku Teks Sejarah SMA Kurikulum 2013. 2015: *Buku II Bidang Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*. Proceeding Seminar LPPM UMP Tahun 2014, Purwokerto.
- Susanto, H., Fatmawati, S., & Fathurrahman, F. (2022a). Analisis Pola Narasi Sejarah dalam Buku Teks Lintas Kurikulum di Indonesia. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 6(2), 228–243.
- Susanto, H., Fatmawati, S., & Fathurrahman, F. (2022b). Analisis Pola Narasi Sejarah dalam Buku Teks Lintas Kurikulum di Indonesia. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 6(2), 228–243.

- Syahrman, A., & Mulyana, A. (2021). Multikulturalisme: Analisis Wacana Buku Teks Pelajaran Sejarah. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 2(1), 17–31.
- Tan, F. D., Whipp, P. R., Gagné, M., & Van Quaquebeke, N. (2019). Students' perception of teachers' two-way feedback interactions that impact learning. *Social Psychology of Education*, 22, 169–187.
- Torkar, G., Kovač, M., & Šebart, M. K. (2022). The role of textbooks in teaching and learning processes. *Center for Educational Policy Studies Journal*, 12(2), 7–10.